



Plagiarism Checker X Originality Report

Similarity Found: 30%

Date: Jumat, Februari 18, 2022

Statistics: 2796 words Plagiarized / 9345 Total words

Remarks: Medium Plagiarism Detected - Your Document needs Selective Improvement.

BAB I PENDAHULUAN Latar Belakang Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah tertentu dan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui oleh negara, sebagaimana yang diatur dalam UU no 6 Tahun 2014 tentang desa. (<http://www.dpr.go.id>) Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah mengatur keuangan dan aset desa dalam rangka memberikan pelayanan pada masyarakat antara lain yang bersumber dari pendapatan asli Daerah, adanya kewajiban bagi pemerintah dari pusat sampai dengan kabupaten atau kota untuk memberikan transfer dana bagi Desa, Hibah ataupun Donasi. Salah satu bentuk transfer dari pemerintah untuk menunjang pembangunan di Desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD).

Dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintah desa menjadi semakin kuat, karena tidak lagi diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2014 tentang pemerintahn daerah, tetapi diatur dengan Undang-Undang tersendiri. Kehadiran Undang-Undang tentang Desa tersebut disamping penguatan desa sebagai basis untuk memajukan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam kaitannya dengan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan desa dapat dijadikan sebagai knowledge based society karena dapat mengkomodir banyak hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat di desa.

Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses penyelenggaraan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya untuk

mensejahterakan masyarakat secara berkeadilan. Untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut pemerintah harus melakukan pengelolaan keuangan yang baik, untuk mencapai tujuan agar dapat mensejahterakan masyarakat. Dalam peraturan Bupati Lampung Utara Nomor 6 Tahun 2018 pasal 2 ayat 1 yaitu pengelolaan keuangan Desa berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. (<http://peraturan.bpk.go.id>) Menurut Sabarno (2007:38) Transparansi adalah salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggara pemerintah yang baik. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate rakyat.

mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak pada orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan. Dengan demikian transparansi menjadi element penting dapat menyelamatkan dana bantuan pemerintah dari perbuatan korupsi. Permendagri No 13 tahun 2014, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Pengelolaan menurut G.R Terry mengatakan bahwa pengelolaan merupakan proses khas yang terdiri atas tindak-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pergerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya (Bumi Aksara 2012).

selanjutnya Soekanto mengemukakan bahwa pengelolaan dalam administrasi adalah merupakan suatu proses yang dimulai dari proses perencanaan, pengaturan, pengawasan, penggerak sampai dengan proses terwujud tujuan (Adisasmita 2014). Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan.

Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus memnuhi prinsip yaitu kepatuhan hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas, kearifan lokal,

keberagaman dan partisipatif. (<http://www.kuningankab.go.id>) Menurut Sumpeno (2013), anggaran pendapatan dan belanja desa merupakan suatu rencana tahunan keuangan desa yang ditetapkan berdasarkan peraturan desa yang mengandung prakiraan sumber pendapatan dan belanja untuk mendukung kebutuhan program pembangunan desa yang bersangkutan. (<http://eprints.umpo.ac.id>) Peran masyarakat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa antara lain, melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa.

Menyampaikan fakta atau bukti penyimpanan pengelolaan anggaran desa kepada pihak-pihak terkait. Memberikan penghargaan atas keberhasilan pemerintah desa dalam pengelolaan anggaran desa. Menurut Bastian (2010:385) Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggung jawaban. Akuntabilitas yaitu kewajiban Agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan, segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat.

Akuntabilitas sangat diperlukan dalam pengelolaan APBDes karna semua kegiatan pemerintah dalam mengelola APBDes harus bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Pengelolaan APBDes yang akuntabel dan transparan akan memberikan dampak positif untuk pemerintah desa, karena akuntabel dan transparan akan menunjukkan kinerja pemerintah desa dalam mengelola dan memanfaatkan keuangan desa, menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa, dan akan meningkatkan perkembangan desa.

Fenomena yang terjadi pada pengelolaan keuangan desa saat ini yaitu masih adanya pelaksanaan musyawarah desa belum maksimal, Di Kabupaten Lampung Utara sendiri baru-baru ini sudah ada Kepala Desa (KADES) dan Aparatur Desa di tahan pihak kepolisian karena telah salah dalam menggunakan Anggaran Dana Desa. Kepala desa itu antara lain Kepala Desa Gunung Besar Abung Tengah yang berinisial PR yang merugikan keuangan negara sebanyak Rp.280 juta, dan Kepala Desa Way Melan Kota Bumi Selatan yang juga di tahan pihak kepolisian karena telah merugikan keuangan negara sebesar Rp. 174.890.203, dan tiga aparatur Desa Ratu Abung Kec.Abung Selatan yang berinisial M (KADES), berinisial S (SEKDES), dan berinisial ZF (PJ KADES) juga yang di tahan Kejari Lampung Utara karena kasus penyalahgunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan dana Desa (DD) tahun Anggaran 2016. (Lampung.inews.id) Di pemerintahan desa kecamatan tanjung raja sendiri terdapat satu desa yang bermasalah dalam pengelolaan dana desanya yang dimana masih minimnya informasi pembangunan dana pembinaan yang tidak pernah disalurkan, ini pun mendasari adanya keinginan untuk melaksanakan penelitian dan melakukan observasi di lingkungan pemerintah desa di 19 desa di kecamatan tanjung raja

(<https://www.kupastuntas.co/2021/09/18/pengelolaan-dd-tulung-balak-lampura-disoal-kabid-pemdes-kita-tindaklanjuti>).

Penelitian ini merupakan replika dari penelitian Nola Situmeang (2020) yang berjudul Analisis Akuntabilitas Transparansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu terletak pada objek penelitian, serta perbedaan pada variabel X. perbedaan variabel yang digunakan dilakukan untuk menemukan hasil yang baru dan memperluas pada penelitian sebelumnya. Penelitian ini bertujuan untuk melihat dampak pengaruh transparansi dan akuntabilitas serta peran masyarakat di 19 desa di kecamatan Tanjung Raja dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan seberapa besar peran masyarakat dalam pengelolaan APBDes itu sendiri. Beberapa kajian mengenai pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pemerintah desa terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya oleh peneliti Nola Situmeang (2020) yang menyatakan bahwa penerapan Transparansi dan Akuntabilitas sangat penting di terapkan oleh pemerintah desa dan kepala desa beserta aparat desa di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Kabupaten Merangin setuju dan sudah menerapkan serta melaksanakan perbuatan sehubungan dengan Akuntabilitas Transparansi. Penelitian sebelum nya yang dilakukan oleh Pipit Juliana dan Purweni Widhianingrum (2017) yang menyatakan Akuntabilitas finansial pemerintah Desa Garon terhadap APBDes Desa Garon cukup ekonomis, tidak efisien namun cukup berkontribusi dalam pembangunan yang efisien dan Akuntabilitas Manajerial Desa Garon telah melibatkan masyarakat, BPD, seluruh perangkat desa, LPM, dan Karang taruna. Serta sudah melibatkan Masyarakat untuk menyusun program Desa Garon.

Penelitian sebelum nya yang dilakukan oleh Nani Anggraini, Idang Nurrodin dan Dani Iskandar (2019) yang menyatakan penerapan Transparansi Desa Jaga Mukti masih kurang sesuai dengan peraturan menteri dalam Negeri No 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Sedangkan penerapan Akuntabilitas sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam Negeri No 13 tahun 2014. Dari hasil pembahasan di atas penulis mencoba melakukan penelitian terhadap Pengaruh Akuntabilitas Transparansi Pemerintah Desa dan Peran Masyarakat dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ada di Kecamatan Tanjung Raja.

Ruang Lingkup Penelitian Ruang lingkup penelitian untuk melihat dampak variabel tersebut dengan melibatkan Pemerintah Desa (Kepala Desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa, Kepala seksi), Masyarakat dan Badan Pemusyawaratan Desa yang mana adalah

fungsi eksekutif yang harus berkoordinasi agar penyelenggaraan pemerintah berjalan dengan baik. Rumusan Masalah Berdasarkan dari fenomena dan masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah sebagai : Apakah dampak dari Transparansi terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Apakah dampak dari Akuntabilitas terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Apakah peran masyarakat berdampak terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tujuan Penelitian Untuk Membuktikan secara empiris Transparansi terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Membuktikan secara empiris Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) Untuk Membuktikan secara empiris peran masyarakat dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes)

Manfaat Penelitian Manfaat Teoritis Hasil penelitian dapat menjadi sumber referensi dan sebagai sumbangan konseptual bagi penelitian selanjutnya bagi penelitian selanjutnya khususnya di Fakultas Ekonomi dan Bisnis IBI Darmajaya.

Hasil penelitian dapat memperkuat penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan Transparansi dan Akuntabilitas Manfaat Praktis Bagi Peneliti meningkatkan wawasan dan pengetahuan penelitian tentang kondisi yang berpengaruh terhadap Transparansi dan Akuntabilitas pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dalam instansi pemerintahan desa. Serta melatih daya pikir kritis dalam menyelesaikan masalah terkait transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran desa sehingga bermanfaat untuk masa depan.

Bagi Masyarakat dan pemerintah desa Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam menyikapi sifat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Bagi Mahasiswa Hasil penelitian ini diharapkan dapat dikembangkan mahasiswa dalam penelitian selanjutnya serta membantu mahasiswa dalam meningkatkan pemahamannya berkaitan dengan ilmu akuntansi dan penerapannya dalam kasus-kasus yang terjadi. Sistematika Penulisan Pembahasan dalam skripsi ini akan disajikan dalam lima bab yang berurutan sebagai berikut : BAB I PENDAHULUAN Pada bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI Pada bab ini berisi uraian tentang teori-teori yang berkaitan dengan transparansi, akuntabilitas, dan peran Masyarakat dalam pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa). BAB III METODE PENELITIAN Pada bab ini menguraikan tentang variabel-variabel penelitian, populas dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Bab ini berisi tentang analisis menyeluruh atas penelitian yang dilakukan. Hasil-hasil statistic di interpresentasikan dan pembahasan dikaji secara mendalam hingga tercapai hasil analisis dari penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN Bab ini penulis membahas secara singkat mengenai kesimpulan berdasarkan hasil analisis data, saran dan keterbatasan dari hasil penelitian ini. DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN

BAB II

LANDASAN TEORI Grand Theory Teori Keagenan (Agency Theory) Menurut Nugroho (2017) teori keagenan menjelaskan bahwa hubungan agensi terjadi ketika principal mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut.

Teori keagenan memandang bahwa pemerintah daerah sebagai agent bagi masyarakat (principal) akan bertindak dengan penuh kesadaran bagi kepentingan mereka sendiri serta memandang bahwa pemerintah daerah tidak dapat dipercaya untuk bertindak dengan sebaik-baiknya bagi kepentingan masyarakat. Menurut Eisenhard (1989) Teori keagenan dilandasi 3 asumsi yaitu: Asumsi tentang sifat manusia, menekankan bahwa manusia memiliki sifat untuk mementingkan diri sendiri (self interest), memiliki keterbatasan rasionalitas (bounded rationality), dan tidak menyukai risiko (risk aversion) Asumsi tentang keorganisasian, adalah adanya konflik antar anggota organisasi, efisiensi sebagai kriteria produktivitas, dan adanya information asymmetry antara prinsipal dan agen Asumsi tentang informasi, adalah bahwa informasi dipandang sebagai barang barang komoditi yang bisa diperjual belikan.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa hubungan keagenan dapat terjadi pada semua entitas yang mengandalakan pada kontrak, baik eksplisit ataupun implisit, sebagai acuan pranata perilaku partisipan. oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa hubungan keagenan terjadi pada setiap entitas. Dari sisi aturan formal, entitas pemerintahan dijalankan dengan mengacu pada seperangkat aturan yang menspesifikasikan tugas, wewenang, dan tanggung jawab setiap partisipan. walaupun cara kerja dan mekanisme hubungan antar partisipan dalam organisasi pemerintah berbeda dengan sektor korporasi, adanya ikatan formal tersebut menunjukkan adanya kontrak dalam organisasi pemerintahan di Indonesia.

Hal ini memberikan justifikasi bahwa terdapat hubungan keagenan dalam organisasi pemerintahan di Indonesia. Mengacu pada UU No 32 tahun 2004 sebagai rujukan kontrak formal, partisipan pada organisasi pemerintahan meliputi rakyat, lembaga bupati atau walikota, dan DPRD. UU tersebut menyatakan bahwa bupati dan walikota bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban program pemerintah.

Teori Akuntansi Pemerintahan Akuntansi pemerintahan adalah akuntansi yang bersangkutan dengan bidang keuangan negara, dan anggaran sampai dengan pelaksanaan dan pelaporannya, termasuk segala pengaruh yang ditimbulkannya. (Sujarweni, 2015) Akuntansi pemerintahan merupakan proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) dari entitas

pemerintahan yang dijadikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak eksternal pemerintah yang memerlukan.

(Halim, 2012) Proses pencatatan, penggolongan dan pengikhtisaran dengan cara tertentu dalam ukuran moneter, transaksi dan kejadian-kejadian yang umumnya bersifat keuangan dan termasuk pelaporan hasil-hasilnya dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. (Tanjung, 2009) Menurut Halim dan Kusufi (2012) Tujuan pokok akuntansi pemerintahan adalah Pertanggung jawaban, yaitu memberikan informasi keuangan yang lengkap pada waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintahan. Fungsi akuntabilitas menandung arti yang lebih luas dari pada sekedar ketaatan terhadap peraturan, tetapi juga keharusan bertindak bijaksana dalam penggunaan sumber-sumber daya.

Manajerial, yaitu akuntansi pemerintah juga harus menyediakan informasi keuangan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijaksanaan dan pengambilan keputusan serta penilaian kinerja pemerintah. Tujuan ini perlu dikembangkan agar organisasi pemerintahan tingkat atas pelaksanaan yang lalu untuk membuat keputusan ataupun penyusunan perencanaan untuk masa yang akan datang. Pengawasan, yaitu akuntansi pemerintahan juga harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional secara efektif dan efisien.

Variabel Y Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa yang ditetapkan dengan peraturan desa yang terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan (jurnal.unigal.ac.id). pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Desa dibekali dengan pedoman dan petunjuk teknis perencanaan dan pengelolaan keuangan desa dapat dijadikan sebagai knowledge based society karena dapat mengkomodir banyak hal yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan pelayanan pada masyarakat di desa.

Anggaran pendapatan dan belanja desa adalah pertanggung jawaban dari pemegang manajemen desa untuk memberikan informasi tentang segala aktifitas dan kegiatan desa kepada masyarakat desa pemerintah atas pengelolaan dana desa dan pelaksanaan berupa rencana-rencana program yang dibiayai dengan uang desa. Dalam APBDesa berisi pendapatan, belanja dan pembiayaan desa (rarangselatan.desa.id). dapat disimpulkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDesa) merupakan sebuah anggaran yang di berikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa yang

bertujuan untuk membangun desa untuk menjadi lebih maju dari segi infrastruktur maupun sumber dayanya. Dan semua pengelolaan anggaran tersebut harus dilakukan secara transparan dan harus dilaporkan kepada pemerintah pusat apa saja yang sudah didapat dari anggaran tersebut.

Variabel X Transparansi Terhadap Pengelolaan APBDesa Menurut Hari Sabarno (2007) bahwa **Transparansi adalah salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggara pemerintah yang baik. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate rakyat. mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak pada orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk disembunyikan.**

dengan demikian transparan menjadi element penting **dapat menyelamatkan dana bantuan pemerintah dari perbutan korupsi.** (<http://ejournal.unsrat.ac.id>) Permendagri No 13 tahun 2014, tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, menyebutkan bahwa transparan adalah prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah. dengan adanya transparansi menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan, dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. (<http://repository.stiewidyagamalumajang.ac.id>) Akuntabilitas Terhadap Pengelolaan APBDesa Akuntabilitas adalah pertanggung **jawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggung jawaban.**

Akuntabilitas yaitu kewajiban **Agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan, segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat** (bastian 2010:385).

Akuntabilitas sangat diperlukan dalam pengelolaan APBDes karna semua kegiatan pemerintah dalam mengelola APBDes harus bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Menurut Halim (2012:20) definisi akuntabilitas publik sebagai berikut : **"Kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban serta menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum atau pimpinan organisasi kepada pihak yang lain yang memiliki hak dan kewajiban untuk meminta kewajiban pertanggungjawaban dan keterangan."**

Sedangkan menurut **Mahmudi (2013:9) Akuntabilitas Publik adalah sebagai berikut :** **"Kewajiban Agen (Pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan, segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat."** Menurut **Bastian (2010:385) Akuntabilitas**

Publik adalah sebagai berikut : "Akuntabilitas Publik adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab, menerangkan kinerja, dan tindakan yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban." Peran Masyarakat Terhadap Pengelolaan APBDes Peran masyarakat dalam proses pelaksanaan anggaran desa, diantaranya : melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa.

menyampaikan fakta atau bukti penyimpanan pengelolaan anggaran desa kepada pihak-pihak terkait. Jumlah dana desa yang diamanatkan melalui auandang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa setiap tahun semakin meningkat. Tahun 2015 dialokasikan sebesar Rp. 20.7 Trilyun, Tahun 2016 sebesar Rp. 46.9 Trilyun, dan Tahun 2017 sebesar Rp.60 Trilyun. Ini berarti bahwa di tahun 2017, rata-rata perdesa mendapatkan 800 juta. Jika kita perhatikan jumlah kenaikan anggaran yang sangat fantastis tersebut hal ini memberikan angin segar bagi pemerintah desa sebagai pengelola dan masyarakat sebagai beneficiaries dari anggaran tersebut.

Keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran adalah hal yang sangat penting baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat. karena terlibat mereka akan berkontribusi terhadap kualitas perencanaan program desa dan memberikan kesempatan bagi mereka dalam menuarkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Penelitian Terdahulu Tabel Penelitian Terdahulu 1.1 No _Peneliti _Tahun _Judul _Hasil _1 _Nola Situmeang _2020 _Analisis Akuntabilitas Transparansi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Di Desa Bukit Bungkul Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin _Aspek akuntabilitas kejujuran hukum, proses, program dan kebijakan. serta aspek transparansi isi informasi dan pemanfaatan mendapatkan perolehan persentase setuju dan sangat setuju dengan perolehan persentase tertinggi.

pemerintah desa telah melakukan perbuatan yang sehubungan dengan akuntabilitas dan transparansi dengan baik. _2 _Annisya Sehin Parllina _2021 _Peran Perangkat Desa pada Akuntabilitas pada pengelolaan dana desa _Perangkat desa bandar klipka telah berperan pada akuntabilitas pengelolaan dana desa dengan menjalankn tugas-tugas nya mulai dari proses, perencanaan, penata usahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. _3. _Purweni Widhianningrum _2017 _Akuntabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa _Akuntabilitas hukum dan Kejujuran desa Garon sudah berpedoman pada UUD RI No.6 Tahun 2014.

Akuntabilitas finansial pemerintah desa Garon terhadap Anggaran pendapatan dan belanja desa cukup ekonomis, tidak efisien, namun memberikan kontribusi pembangunan yang cukup efektif _4 _Annisa Novrianti _2018 _Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDesa) _Transparansi dan Akuntabilitas di desa sungai rengit sudah berjalan baik meski masih ada yang harus diperbaiki _ _5 _Nani Anggraini, Idang Nurrodin dan Dani Iskandar _2019 _Penerapan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) _Penerapan Transparansi Desa Jaga Mukti masih kurang sesuai dengan peraturan menteri dalam negri no 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

Penerapan Akuntabilitas di Desa Jagamukti sudah sesuai dengan peraturan menteri dalam negri no 113 tahun 2014. _ _Kerangka Pemikiran Kerangka Pikiran digunakan sebagai acuan agar peneliti memiliki arah penelitian yang sesuai dengan penelitian. kerangka pemikiran yang melandasi penelitian adalah pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Gambar 2.5 Bangunan Hipotesis Transparansi Menurut Sabarno (2007:38) Transparansi adalah salah satu aspek mendasar bagi terwujudnya penyelenggara pemerintah yang baik.

Transparansi sangat penting diterapkan dalam pengelolaan Anggaran Keuangan Desa untuk menghindari rasa tidak percayanya masyarakat kepada pemerintah desa dalam mengelola dana desa. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandate rakyat. mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak pada orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakan.

Penelitian Nola Situmeang (2020) menunjukkan bahwa Transparansi sangat penting diterapkan dalam pemerintahan desa untuk memberikan informasi yang baik. Menurut Adrianto (2007) Transparansi adalah keterbukaan secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. Penelitian Umami dan Nurodin (2017) yang menunjukkan bahwa Transparansi berpengaruh secara simultan terhadap pengelolaan keuangan desa. Dengan transparansi, kebohongan sulit untuk di sembunyikan.

dengan demikian transparan menjadi element penting dapat menyelamatkan dana bantuan pemerintah dari perbutan korupsi. Upaya ini berguna dalam menekan kecenderungan rasa tidak percaya masyarakat kepada pemerintah. Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut : H1 : Transparansi berpengaruh terhadap kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa dalam menjalankan tugas untuk membangun dan mengembangkan desa Akuntabilitas Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggung jawaban.

Akuntabilitas yaitu kewajiban Agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan, segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (bastian 2010:385). Menurut LAN (1999) Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang, badan hukum, pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan atau pertanggung jawaban. Penelitian Pipit Juliana dan Purweni Widhianingrum (2017) yang menyatakan Akuntabilitas finansial pemerintah desa Garon terhadap APBDes Desa Garon cukup ekonomis, tidak efisiensi namun cukup berkontribusi dalam pembangunan desa.

Penelitian Nola Situmeang (2020) yang menyatakan bahwa penerapan Akuntabilitas sangat penting diterapkan oleh pemerintah desa dan kepala desa beserta aparat desa sebagai bentuk pertanggung jawaban kinerja mereka. Akuntabilitas sangat diperlukan dalam pengelolaan APBDes karna semua kegiatan pemerintah dalam mengelola APBDes harus bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Setiap aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik semua harus ada pertanggung jawaban kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui apa saja kinerja yang sudah dilakukan oleh pemerintah.

upaya ini dilakukan untuk menekan penipuan dalam kinerja pemerintah. berdasarkan urain tersebut, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut : H2 : Akuntabilitas berpengaruh untuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat dalam menjalankan tugas/mandat dari masyarakat. Peran Masyarakat Wahjudin (2011) peran masyarakat dalam proses penyusunan anggaran adalah : Memberikan masukan kepada BPD dan Pemerintah Desa Membuat dan Mengusulkan Rencana Anggaran Alternatif terhadap rancangan anggaran desa yang diajukan oleh kepala desa atau BPD Terlibat aktif dalam rapat dengar pendapat atau rapat paripurna pembahasan dan penetapan anggaran desa memberikan dukungan terhadap rancangan anggaran desa yang partisipatif, transparan, akuntabel, memihak kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Peran masyarakat dalam proses pelaksanaan anggaran desa, diantaranya : Melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa Menyampaikan fakta atau bukti penyimpangan pengelolaan anggaran desa kepada pihak-pihak terkait Bersedia menjadi saksi atas penyimpangan pengelolaan anggaran desa Memberikan penilaian pelaksanaan anggaran desa Mendorong pihak-pihak terkait untuk melaksanakan anggaran secara disiplin.

Musyawarah perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu ruang bagi masyarakat untuk mengusulkan program yang sesuai dengan kebutuhan untuk

mengusulkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. Forum tersebut akan sangat membantu pemerintah desa dalam upaya mengidentifikasi kebutuhan masyarakat. Musyawarah perencanaan pembangunan desa merupakan kegiatan perencanaan partisipatif dalam pembangunan desa yang diadakan setiap tahun yang melibatkan masyarakat secara penuh untuk merumuskan program prioritas dengan melibatkan masyarakat secara penuh untuk merumuskan program prioritas dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat misalnya kelompok pemuda, perempuan, petani dan kelompok masyarakat marginal lainnya.

Keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran adalah hal yang sangat penting baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat. Karena keterlibatan desa maupun masyarakat akan berkontribusi terhadap kualitas perencanaan program desa dan memberikan kesempatan bagi mereka dalam menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Oleh karena itu, pemerintah desa harus pro-aktif melibatkan masyarakat dengan menyediakan wadah partisipasi dalam setiap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa.

Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut : H3 : Peran masyarakat berpengaruh terhadap pengelolaan, perencanaan, pembangunan Anggaran dana desa

BAB III METODE PENELITIAN Sumber Data Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang tidak menitik beratkan pada kedalaman data, yang penting dapat merekam data sebanyak-sebanyaknya dari populasi yang luas. Penelitian Kuantitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang dapat diperoleh dengan menggunakan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara lain dari kuantitatif (sujarweni,2014).

Data dalam penelitian ini terdiri dari data kuantitatif dan data kualitatif yang dikuantitatifkan agar dapat diproses lebih lanjut dalam (Mudrajad Kuncoro,2013:145). Peneliti ini bertujuan untuk menguji hasil hipotesis yang berupa pengaruh antar variabel. Di dalam penelitian ini pengaruh yang diteliti meliputi Transparansi Akuntabilitas dan Peran Masyarakat. Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menyebarkan kuesioner kepada partisipan penelitian yang bersangkutan.

kuesioner merupakan suatu pengumpulan data dengan memberikan atau menyebarkan daftar pertanyaan-pertanyaan kepada partisipan dengan harapan memberikan respons atas daftar pertanyaan tersebut (Mudrajad Kuncoro, 2013:183). Pembagian kuesioner dilakukan peneliti kepada pegawai yang memiliki jabatan pada bidang masing-masing yang termasuk didalam struktur organisasi pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa di Desa Tanjung Raja. Kuesioner yang di sebar berupa soal kasus penelitian eksperimen yang berkaitan dengan objek yang diteliti, kuesioner diberikan disertai dengan surat permohonan izin dan penjelasan mengenai tujuan dari penelitian yang dilakukan tersebut.

Selain itu, dalam penyebaran kuesioner juga disertakan petunjuk pengisian yang jelas agar mempermudah partisipan dalam memberikan jawaban secara lengkap. Kuesioner dalam penelitian ini menggunakan pernyataan terstruktur yang alternative jawabannya telah tersedia. Responden diminta menjawab pernyataan tersebut dalam bentuk skala interval yang mengukur sikap responden terhadap pernyataan-pernyataan yang disajikan, yang terbagi menjadi : 1 = Sangat Tidak Setuju (STS) 2 = Tidak Setuju (ST) 3 = Netral (N) 4 = Setuju (S) 5 = Sangat Setuju (SS) Populasi dan Sampel Populasi populasi adalah sekelompok objek yang menjadi sasaran penelitian berupa manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, udara, gejala, nilai, peristiwa, sikap hidup dan sebagainya, sehingga objek-objek ini dapat menjadi sumber penelitian (Bungin 2013:101). Jadi, populasi dari penelitian ini adalah 19 desa di kecamatan tanjung raja.

Kriteria Sampel Badan Permusyawaratan Desa Kepala Desa yang termasuk struktur pemerintah desa Sekretaris yang termasuk dalam struktur pemerintah desa Bendahara yang termasuk dalam struktur pemerintah desa kepala seksi yang termasuk dalam

struktur pemerintah desa Tabel 3.1 Sampel penelitian No_Keterangan_Jumlah __1_Kepala Desa_19 orang __2_Bendahara Desa_19 0rang __3_Sekertaris Desa_19 orang __4_Kaur Perencanaan_12 orang __5_Kaur Pemerintahan_12 orang __6_Bpd_19 orang __ Variabel Penelitian Dan Definisi Operasional Variabel Variabel Penelitian Variabel penelitian merupakan segala sesuatu yang dapat diberi berbagai macam nilai. Dalam penelitian ini digunakan penelitian dependent dan independent.

Variabel dependent (y) **pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa** (apbdesa), variabel independent (x1) pengaruh transparansi, (x2) pengaruh akuntabilitas, variabel independent (x3) pengaruh peran masyarakat. Definisi Operasional Variabel Variabel Dependent Y (**Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdesa)** **Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa)** adalah peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APBDesa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan (sastra.desa.id).

pendapatan desa merupakan penghasilan yang diperoleh desa yang bersumber dari pendapatan asli desa (PAD), pendapatan transfer ataupun pendapatan lain-lain desa. pendapatan transfer desa binangun berasal dari dana desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil pajak dan retribusi (BHPR) dan bantuan keuangan kabupaten (BKK). Dana desa sebagai salah satu sumber pendaptan desa, pengelolaan nya dilakukan dalam kerangka pengelolaan keuangan desa.

keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran (bnangun.singgahan.desa.id). Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat mendapatkan informasi seluas-luas nya tentang keuangan desa Akuntabel yaitu perwujudan pertanggung jawaban pengelolaan dan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian yang telah ditetapkan partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasi.

Belanja desa merupakan pengeluaran yang dilakukan oleh desa baik melalui rekening desa ataupun langsung dibayar ke supplier yang merupakan kewajiban dalam satu tahun anggaran dan tidak diperbolehkan pembayaran kembali serta diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan desa yang di sepakati dalam musyawarah yang meliputi 5 bidang, yakni (1) penyelenggaraan pemerintah desa, (2) pelaksanaan pembangunan desa, (3) pembinaan kemasyarakatan desa, (4) pemberdayaan masyarakat desa, (5) penanggulangan bencana, keadaan mendesak dan darurat desa. Indikator-indikator variabel **Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)** yaitu :

1. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap pelaksanaan pembangunan desa 2. Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) terhadap pemberdayaan dan pembinaan masyarakat

Variabel independent X1 (Transparansi) Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintah, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai (Loina Lalolo Krina P, 2003).

Krina (2003:13) mendefinisikan transparansi sebagai prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Indikator-indikator variabel Transparansi yaitu : 1. Keterbukaan terhadap Anggaran Desa 2. Mudah mendapatkan informasi yang akurat 3. keterbukaan dalam Pemanfaatan objek

Menurut Mardiasmo (2004:30), Transparansi berarti keterbukaan (openness) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi.

adapun indikator transparansi menurut Kristianten (2006:73) yakni, kesediaan dan aksesibilitas dokumen, kejelasan dan kelengkapan informasi, keterbukaan proses, dan kerangka regulasi yang menjamin transparansi.

Variabel independent X2 (Akuntabilitas) Akuntabilitas adalah pertanggung jawaban atau keadaan yang dapat dimintai pertanggung jawaban. Akuntabilitas yaitu kewajiban Agen (pemerintah) untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan, segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pemberi mandat (indra bastian 2010:385).

Akuntabilitas sangat diperlukan dalam pengelolaan APBDes karna semua kegiatan pemerintah dalam mengelola APBDes harus bisa dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Indikator-indikator variabel akuntabilitas yaitu : 1. Kejujuran dan hukum 2. Akuntabilitas Proses 3. Kebijakan indikator Akuntabilitas menurut Russel (1997:368) yaitu proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga dan memenuhi standar administrasi yang berlaku. akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program.

Variabel Independent X3 (Peran Masyarakat) Keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran adalah hal yang sangat penting baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat. Karena keterlibatan desa maupun masyarakat akan berkontribusi terhadap kualitas perencanaan program desa dan memberikan kesempatan bagi mereka dalam menyuarakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. oleh karena itu, pemerintah desa harus pro-aktif melibatkan masyarakat dengan menyediakan wadah partisipasi dalam

setia perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program desa. Indikator-indikator variabel peran masyarakat yaitu : 1.Pengambilan keputusan 2.Penyusunan anggaran 3.Pelaksanaan Anggaran Berpartisipasi dalam perencanaan dan penganggaran adalah hak setiap masyarakat yang sudah dijamin oleh peraturan pemerintah No 32 dan 33 tahun 2004 mengenai dana perimbangan pusat dan daerah serta dijamin oleh peraturan menteri dalam negeri (PERMENDAGRI) No 59 tahun 2007 mengenai tata cara pengelolaan keuangan daerah, serta Undang-Undang No 6 tahun 2014.

Metode Analisis Data Analisis data dari penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan data yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa maksud untuk menarik kesimpulan yang berlaku secara generalisasi. Data yang sudah dikumpulkan dari kuesioner responden kemudian diubah kedalam bentuk angka. Pengolahan data menggunakan program SPSS For Window Version 23. Untuk menganalisis setiap pertanyaan atau indicator, dihitung Frekuensi jawaban setiap kategori (pilihan jawaban) dan jumlahkan.

Setelah setiap indikator mempunyai jumlah kemudian dihitung rata-rata maka jawaban telah diketahui kemudian hasil tersebut diinterpretasikan dengan alat bantu tabel kontinum. Dalam melakukan penelitian ini akuntabilitas pada pengelolaan anggaran pendapatan belanja desa memerlukan tahapan analisis yang menggunakan teknik menggambarkan dan menginterpretasikan arti dari data yang terkumpul dengan memberikan pertanyaan dan mengumpulkan hasil dari responden melalui pengisian kuesioner dengan pihak yang terkait mengenai aspek-aspek yang terkait dengan situasi yang diteliti. Sehingga dapat memperoleh gambaran secara umum mengenai pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. 3.6

Teknik Skala Pengukuran Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah suatu pengukuran dari Akuntabilitas, Transparansi dan Peran Masyarakat terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ada di Kecamatan Tanjung Raja dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan skala pengukuran yang berbentuk Likert. Data yang diperoleh adalah data interval dengan skor 1 s/d 5 point (Sugiono, 2016). Skala yang berisi lima tingkat preferensi jawaban dengan pemilihan sebagai berikut: a. Skor 1 untuk jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) b. Skor 2 untuk jawaban Tidak Setuju (TS) c. Skor 3 untuk jawaban Netral (N) d. Skor 4 untuk jawaban Setuju (S) e. Skor 5 untuk jawaban Sangat Setuju (SS) 3.7

Teknik Pengujian Data Mengingat pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data kuesioner, maka kualitas kuesioner dan kesanggupan responden dalam menjawab pertanyaan merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian ini. Keabsahan dalam penelitian ini sangat ditentukan oleh alat ukur variable yang akan diteliti. Apabila alat

yang digunakan dalam proses pengambilan data tidak valid, maka hasil penelitian yang diperoleh tidak mampu menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Instrumen yang valid berarti alat ukur yang digunakan untuk mendapatkan data itu valid. Valid berarti instrument itu dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur.

Instrument yang realibel adalah instrument yang bila digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang sama. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan uji validitas dan uji reabilitas (Indriantoro dan Supomo, 2014). Adapun dalam penelitian ini tahapan dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut : 1. Pembuatan rancangan penelitian. Pada tahapan ini, peneliti terlebih dahulu menentukan permasalahan yang akan diteliti, sehingga desain penelitian akan bergantung pada permasalahan tersebut.

Penentuan ini mencakup dari merumuskan masalah, tujuan, manfaat, menentukan landasan teori serta mencari sumber-sumber literatur yang mendukung penelitian. 2. Pelaksanaan penelitian, yang berisi kepada pengumpulan data mulai dari pembagian kuesioner dan wawancara untuk mendukung penelitian samapai pengumpulan kembali kuesioner. 3. Melakukan data coding. Pengkodean data dari kuesioner dimaksud untuk memberi suatu tanda tertentu untuk menyusun data mentah secara sistematis dari kuesioner yang telah disusun oleh peneliti. 4.

Melakukan data cleaning dengan cara memastikan data yang dikodekan sudah benar dengan kode yang ditetapkan untuk tiap item kuesioner. Dalam proses ini juga dilihat apakah dalam kuesioner, responden sudah mengisi kuesioner dengan baik. 5. Melakukan tabulasi data, yaitu dengan cara memasukkan data yang telah dikodekan ke dalam table-tabel tertentu untuk dilakukan perhitungan statistik. Dalam penelitian ini, tabulasi data dibantu dengan program Microsoft Excel. Selanjutnya, langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis statistik pengujian data dengan menggunakan bantuan SPSS 23 yaitu sebagai berikut : 1.

Langkah pertama yang dilakukan peneliti dalam mengumpulkan data dalam penelitian ini yaitu menyebarkan kuesioner kepada para responden sebanyak 30 orang sesuai dengan sampel yang dipilih. 2. Kemudian melakukan penginputan data ke dalam Microsoft Excel yang terbagi menjadi identitas responden dan item kuesioner. Data responden terdiri dari Nama, Umur, Jabatan, Jenis kelamin, Pendidikan terakhir, dan masa kerja responden. 3. Setelah data dari kuesioner diinput kedalam Microsoft Excel, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan uji Validitas pada aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Solutions) Versi 23.

Uji validitas dilakukan dengan teknik Pearson Correlation yaitu dengan melihat nilai

korelasi atau disebut nilai r hitung. R hitung tersebut kemudian dibandingkan dengan nilai r tabel dengan kriteria yaitu jika nilai r hitung > r tabel maka item kuesioner dianggap valid. Adapun nilai r tabel untuk jumlah responden sebanyak 30 orang yaitu sebanyak 0,361. Pengujian dilakukan dengan langkah sebagai berikut : pertama membuka menu Analyze > Correlate > Bivariate.

Kemudian akan muncul menu Bivariate Correlations, lalu masukkan semua item kuesioner beserta total skor keseluruhan dan memberikan checklist pada pilihan Pearson untuk Correlation Coefficients serta signifikansi uji dilakukan dengan Two-tailed. 4. Uji Reliabilitas menggunakan aplikasi SPSS Versi 23 dengan teknik Cronbach's Alpha. Kriteria yang digunakan yaitu apabila nilai Cronbach's Alpha pada output data > 0,70, maka item kuesioner dinyatakan reliabel. Langkah-langkah yang dilakukan yaitu : memilih menu Analyze > Scale > Reliability Analysis. Kemudian memasukkan data item kuesioner dari A1-D3 tanpa total. 5.

Statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran umum data tanpa menarik kesimpulan khusus. Untuk pengujian statistik deskriptif ini, peneliti menggunakan aplikasi SPSS Versi 23 dengan langkah – langkah sebagai berikut : Analyze > Descriptive Statistics > Descriptives, kemudian memasukkan data dari total masing-masing 43 item pertanyaan (Total A, Total B, Total C, Total D, Total TM, Total TII, Total TP). Uji Validitas Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner.

Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2014). Validitas merupakan derajat ketetapan antara data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Data yang valid adalah data yang tidak berbeda antara data yang dilaporkan peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek penelitian (Indriantoro dan Supomo, 2014).

Uji Validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan Momen Produk Correlation (Pearson Correlation). Adapun rumusnya yaitu sebagai berikut:
$$r_{xy} = \frac{\sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{(\sum X^2 - (\sum X)^2)(\sum Y^2 - (\sum Y)^2)}}$$
 KETERANGAN : r_{xy} : koefisien butir korelasi
N : jumlah respon uji coba
ΣX : jumlah skor item yang diperoleh uji coba
ΣY : jumlah skor item yang diperoleh responden
Nilai korelasi yang diperoleh untuk mengetahui apakah nilai korelasi yang diperoleh signifikan atau tidak.

Jika r hitung lebih besar dari r tabel pada uji dua sisi dengan taraf kepercayaan tertentu, maka disimpulkan instrumen tersebut memenuhi kriteria validitas sehingga item tersebut layak (valid). Uji Reliabilitas Setelah melakukan uji validitas, selanjutnya dilakukan uji reliabilitas. Tujuan utama uji reliabilitas adalah untuk mengetahui konsistensi atau

keteraturan hasil pengukuran suatu instrument apabila instrument digunakan sebagai alat ukur suatu objek atau responden (Indriantoro dan Supomo,2014).

Hasil uji Reabilitas mencerminkan dapat dipercaya atau tidaknya suatu instrumen penelitian berdasarkan tingkat kemantapan dan ketetapan suatu alat ukur dalam pengertian bahwa hasil pengukuran yang didapatkan merupakan ukuran yang benar dari sesuatu yang diukur, dalam penelitian ini kriteria yang digunakan adalah one shot, artinya dilakukan satu kali pengukuran saja dan dibandingkan dengan pertanyaan lainnya atau dengan kata lain mengukur korelasi antar jawaban pertanyaan. SPSS memberikan fasilitas untuk mengukur reabilitas dengan uji stastic Cronbach Alpha (a). Suatu konstruk atau variable dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,70 (Ghozali, 2014).

Adapun rumus untuk menghitung Cronbach's Alpha yaitu sebagai berikut : $r_{11} = \frac{[\sum_{i=1}^k (r_{ii} - 1)]}{[1 - \sum_{i=1}^k (r_{ii} - 1)]}$ keterangan : r_{11} : koefisien realibilitas instrumen k : jumlah butir pertanyaan $\sum_{i=1}^k (r_{ii} - 1)$: jumlah varian butir $\sum_{i=1}^k (r_{ii} - 1)$: jumlah varian total

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN Deskripsi Data Deskripsi data merupakan gambaran data yang akan digunakan untuk proses pengujian hipotesis. Deskripsi data tersebut dilakukan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan kondisi responden sebagai objek. Dalam penelitian ini dilihat dari karakteristik responden antara lain jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan dan lama kerja.

Deskripsi Karakteristik Responden Jenis Kelamin Untuk mengetahui jenis kelamin responden dapat dilihat dari tabel berikut: Tabel 4.1 Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin No _Jenis Kelamin _Kecamatan Tanjung Raja _ _ _Jumlah (Orang) _Persentase (%) _1. _Laki-laki _58 _74,4 _2. _Perempuan _20 _25,6 _TOTAL _78 _100 _Sumber : Hasil data diolah tahun 2022 Dari tabel 4.1 dapat dilihat bahwa karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin lebih banyak didominasi oleh responden dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 58 orang.

Sedangkan jumlah responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 20 orang. Usia Untuk mengetahui usia responden, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 4.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia No _Usia (Tahun) _Kecamatan Tanjung Raja _ _ _Jumlah (Orang) _Persentase (%) _1. _20-29 _11 _14,1 _2. _30-39 _33 _42,3 _3. _40-49 _28 _35,9 _4. _50-60 _6 _7,7 _TOTAL _78 _100 _Sumber : Hasil data diolah tahun 2022 Dari tabel 4.2

dapat dilihat bahwa karakteristik responden berdasarkan usia dengan usia 30-39 menempati tingkat tertinggi dengan jumlah 33 orang, diikuti dengan usia 40-49 sebanyak 28 orang, usia 20-29 sebanyak 11 orang, dan 450-6 sebanyak 6 orang. Untuk mengetahui lama kerja responden, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut: Tabel 4.4 Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Kerja No _Lama Kerja _Kecamatan Tanjung Raja _ _ _Jumlah (Orang) _Persentase (%) _1. _< 2 tahun _13 _16,8 _2. _2-3,5 tahun _39 _50 _3. _>3,5 tahun _22 _28,2 _TOTAL _78 _100 _Sumber : Hasil data diolah tahun 2022 Dari tabel 4.4

dapat diketahui bahwa karakteristik responden berdasarkan lama kerja 2-3,5 tahun menempati posisi paling tinggi sebanyak 39 orang, diikuti lama kerja >3,5 tahun sebanyak 22 orang, dan lama kerja <2 tahun sebanyak 13 orang. Deskripsi Objek Penelitian Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah disebarakan secara langsung kepada para responden di Kecamatan Tanjung Raja sebanyak 78 **kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini.** Tabel 4.5

Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner Keterangan _Jumlah Kuesioner _Persentase (%) _Kuesioner yang disebarakan _100 _100 _Kuesioner yang tidak

kembali (13) (13) _ Kuesioner yang rusak atau gugur (9) (9) _ Kuesioner yang digunakan 78 78 _ Hasil Analisis Data Statistik Deskriptif Tabel 4.6 Statististik Deskriptif Descriptive Statistics _ N _ Minimum _ Maximum _ Mean _ Std. Deviation _ Akuntabilitas 78 1 5 52.42 3.209 _ Transparasi 78 1 5 42.26 5.044 _ Peran Masyarakat 78 1 5 17.32 2.388 _ Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 78 1 5 34.06 2.015 _ Valid N (listwise) 78 _ Sumber : Hasil data diolah tahun 2022 Dalam variabel pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa (Y) menunjukkan skor terendah atau minimum sebesar 29 dan skor tertinggi atau maximum yaitu 38.

Serta mean sebesar 34,06 dan standar deviasi sebesar 2,015. Dalam variabel akuntabilitas menunjukkan skor terendah atau minimum dalam variabel X1 sebesar 45 dan skor tertinggi atau maximum yaitu 60. Serta mean sebesar 52,42 dan standar deviasi sebesar 3,209. Dalam variabel transparasi menunjukkan skor terendah atau minimum dalam variabel X2 sebesar 4 dan skor tertinggi atau maximum yaitu 48. Serta mean sebesar 42,26 dan standar deviasi sebesar 5,044. Dalam variabel peran masyarakat menunjukkan skor terendah atau minimum dalam variabel X3 sebesar 12 dan skor tertinggi atau maximum yaitu 20. Serta mean sebesar 17,32 dan standar deviasi sebesar 2,388.

Hasil Uji Validitas Uji Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur pada kuesioner tersebut. Kuesioner dikatakan valid jika nilai signifikansi rtabel Ghozali (2016) dalam (Puspitangrum, 2018). Uji validitas dilakukan dengan menggunakan kolerasi product moment. Uji validitas ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi SPSS. Kriteria pengujian untuk uji validitas ini adalah: Bila probabilitas (sig) < 0,05 maka instrument valid Bila probabilitas (sig) > 0,05 maka instrument tidak valid r-tabel untuk 78 responden $DF-2 = 78 - 2 = 76$ adalah sebesar 0.2227 Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh data sebagai berikut: Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Item Pertanyaan _r Hitung _r Tabel _Hasil_Simpulan _X1.1 0,492 0,2227 _r Hitung > r Tabel _Valid _X1.2 0,504 0,2227 _r Hitung > r Tabel _Valid _X1.3

_0,623 0,2227 _r Hitung > r Tabel _Valid _X1.4 0,579 0,2227 _r Hitung > r Tabel _Valid _X1.5 0,496 0,2227 _r Hitung > r Tabel _Valid _X1.6 0,442 0,2227 _r Hitung > r Tabel _Valid _X1.7 0,453 0,2227 _r Hitung > r Tabel _Valid _X1.8 0,327 0,2227 _r Hitung > r Tabel _Valid _X1.9 0,332 0,2227 _r Hitung > r Tabel _Valid _X1.10 0,518 0,2227 _r Hitung > r Tabel _Valid _X1.11 0,490 0,2227 _r Hitung > r Tabel _Valid _X1.12 0,494 0,2227 _r Hitung > r Tabel _Valid _X2.1 0,530 0,2227 _r Hitung > r Tabel _Valid _X2.2 0,548 0,2227 _r Hitung > r Tabel _Valid _X2.3 0,309 0,2227 _r Hitung > r Tabel _Valid _X2.4 0,256 0,2227 _r Hitung > r Tabel _Valid _X2.5 0,441

_0,2227_r Hitung > r Tabel _Valid _X2.6

_0,416 _0,2227_r Hitung > r Tabel _Valid _X2.7 _0,407 _0,2227_r Hitung > r Tabel
_Valid _X2.8 _0,474 _0,2227_r Hitung > r Tabel _Valid _X2.9 _0,408 _0,2227_r Hitung
> r Tabel _Valid _X2.10 _0,669 _0,2227_r Hitung > r Tabel _Valid _X3.1 _0,756 _0,2227
_r Hitung > r Tabel _Valid _X3.2 _0,878 _0,2227_r Hitung > r Tabel _Valid _X3.3 _0,909
_0,2227_r Hitung > r Tabel _Valid _X3.4 _0,758 _0,2227_r Hitung > r Tabel _Valid _
_Y1.1 _0,541 _0,2227_r Hitung > r Tabel _Valid _Y1.2 _0,547 _0,2227_r Hitung > r Tabel
_Valid _Y1.3 _0,410 _0,2227_r Hitung > r Tabel _Valid _Y1.4 _0,373 _0,2227_r Hitung
> r Tabel _Valid _Y1.5 _0,440 _0,2227_r Hitung > r Tabel _Valid _Y1.6 _0,445 _0,2227
_r Hitung > r Tabel _Valid _Y1.7

_0,382 _0,2227_r Hitung > r Tabel _Valid _Y1.8 _0,504 _0,2227_r Hitung > r Tabel
_Valid _Sumber : Hasil data diolah tahun 2022 Dari tabel 4.7 diketahui bahwa hasil uji
validitas untuk variabel Y, X1, X2, X3 yaitu nilai sig seluruh butir pertanyaan lebih kecil
dari alpha (0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh indikator penelitian bisa
digunakan dalam penelitian ini. Hasil Uji Reliabilitas Menurut Wiratna Sujerweni (2014),
Kuesioner dikatakan reliable jika nilai Cronbach alpha >0,6.

Berdasarkan hasil pengolahan data menggunakan SPSS 23 diperoleh hasil pengujian
reliabilitas kuesioner digunakan dengan menggunakan Cronbach's Alpha. Tabel 4.8 Hasil
Uji Reliabilitas Item Pertanyaan _Nilai Cronbach's Alpha _Alpha (a) _Kondisi _Keterangan
_X1.1 _0,717 _0,6 _Cronbach's alpha>alpha _Reliabilitas _X1.2 _0,716 _0,6 _Cronbach's
alpha>alpha _Reliabilitas _X1.3 _0,710 _0,6 _Cronbach's alpha>alpha _Reliabilitas _
_X1.4 _0,706 _0,6 _Cronbach's alpha>alpha _Reliabilitas _X1.5 _0,709 _0,6 _Cronbach's
alpha>alpha _Reliabilitas _X1.6 _0,709 _0,6 _Cronbach's alpha>alpha _Reliabilitas _
_X1.7

_0,718 _0,6 _Cronbach's alpha>alpha _Reliabilitas _X1.8 _0,724 _0,6 _Cronbach's
alpha>alpha _Reliabilitas _X1.9 _0,721 _0,6 _Cronbach's alpha>alpha _Reliabilitas _
_X1.10 _0,714 _0,6 _Cronbach's alpha>alpha _Reliabilitas _X1.11 _0,718 _0,6
_Cronbach's alpha>alpha _Reliabilitas _X1.12 _0,723 _0,6 _Cronbach's alpha>alpha
_Reliabilitas _X2.1 _0,722 _0,6 _Cronbach's alpha>alpha _Reliabilitas _X2.2 _0,719 _0,6
_Cronbach's alpha>alpha _Reliabilitas _X2.3 _0,718 _0,6 _Cronbach's alpha>alpha
_Reliabilitas _X2.4 _0,722 _0,6 _Cronbach's alpha>alpha _Reliabilitas _X2.5 _0,709 _0,6
_Cronbach's alpha>alpha _Reliabilitas _X2.6 _0,722 _0,6 _Cronbach's alpha>alpha
_Reliabilitas _X2.7

_0,730 _0,6 _Cronbach's alpha>alpha _Reliabilitas _X2.8 _0,729 _0,6 _Cronbach's
alpha>alpha _Reliabilitas _X2.9 _0,722 _0,6 _Cronbach's alpha>alpha _Reliabilitas _

_X2.10_0,702_0,6_Cronbach's alpha>alpha_Reliabilitas __X3.1_0,712_0,6_Cronbach's alpha>alpha_Reliabilitas __X3.2_0,709_0,6_Cronbach's alpha>alpha_Reliabilitas __X3.3_0,711_0,6_Cronbach's alpha>alpha_Reliabilitas __X3.4_0,700_0,6_Cronbach's alpha>alpha_Reliabilitas __Y1.1_0,723_0,6_Cronbach's alpha>alpha_Reliabilitas __Y1.2_0,723_0,6_Cronbach's alpha>alpha_Reliabilitas __Y1.3_0,729_0,6_Cronbach's alpha>alpha_Reliabilitas __Y1.4_0,719_0,6_Cronbach's alpha>alpha_Reliabilitas __Y1.5

_0,732_0,6_Cronbach's alpha>alpha_Reliabilitas __Y1.6_0,725_0,6_Cronbach's alpha>alpha_Reliabilitas __Y1.7_0,721_0,6_Cronbach's alpha>alpha_Reliabilitas __Y1.8_0,723_0,6_Cronbach's alpha>alpha_Reliabilitas __Sumber : Hasil data diolah tahun 2022 dari tabel 4.8 diketahui bahwa hasil Cronbach's Alpha variabel Y, X1, X2, X3 lebih besar dari 0,6. Maka dapat disimpulkan bahwa kuesioner pada seluruh variabel reliabel.

Hasil Uji Persyaratan Analisis Data Hasil Uji Normalitas Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali (2016) dalam (Puspitangrum, 2018). Adapun Uji statistik yang digunakan pada penelitian ini diuji One Sample Kolmogorov Smirnov Test, Dengan taraf signifikan 0,05 atau 5%. Jika signifikan yang dihasilkan > 0,05 maka distribusi datanya dikatakan normal. Sebaliknya jika signifikan yang dihasilkan < 0,05 maka data tidak terdistribusi secara normal. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada table. Tabel 4.9

Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test __Unstandardized Residual __N_78 __Normal Parameters,b_Mean_.0000000 __Std. Deviation_1.09393973 __Most Extreme Differences_Absolute_.065 __Positive_.065 __Negative_-.046 __Kolmogorov Smirnov_.065 __Asymp. Sig. (2-tailed)_.200c,d __Sumber : Hasil data diolah tahun 2022 Dari tabel 4.9 dapat diketahui bahwa nilai signifikansi yang diperoleh melalui uji one sample Kolmogorov Smirnov adalah sebesar 0,200 yang berarti bahwa nilai signifikansi tersebut >0,05.

Dapat disimpulkan bahwa Ho diterima atau seluruh data residual berdistribusi normal. Hasil Uji Multikolinearitas Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel independen. Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas didalam model regresi dapat dilihat dari nilai tolerance dan varian inflation factor (VIF). Jika nilai VIF<10 dan nilai tolerance>10 menunjukkan tidak terdapat gejala multikolinearitas. Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas Variabel Independen_Tolerance_VIF_Kesimpulan __Akuntabilitas_0,905_1,105_Tidak terdapat multikolinieritas __Transparasi_0,932_1,073_Tidak

terdapat multikolinieritas __Peran Masyarakat _0,957 _1,045 _Tidak terdapat multikolinieritas __Sumber : Hasil data diolah tahun 2022 Berdasarkan tabel 4.10 menunjukkan seluruh nilai VIF dari masing-masing variabel tidak melebihi batas nilai 10. Nilai tolerance seluruh variabel independen > 0,10.

Hal ini berarti bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak menunjukkan adanya gejala multikolinieritas yang berarti semua variabel dapat digunakan. Hasil Uji Heteroskedastisitas Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model regresi yang baik adalah yang tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun dasar pengambilan keputusannya adalah jika $\text{sig} > 0,05$ maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika $\text{sig} < 0,05$ maka terjadi gejala heteroskedastisitas. Tabel 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas Model _Unstandardized Coefficients _Standardized Coefficients _t _Sig. __ _B _Std.

Error_Beta ___ _1_(Constant) _1,808 _1,586 ___ _1,140 _0,258 ___ _Akuntabilitas _0,011 _0,024 _0,057 _0,478 _0,634 ___ _Transparasi _-0,056 _0,031 _-0,213 _-1,821 _0,073 ___ _Peran Masyarakat _0,047 _0,038 _0,143 _1,241 _0,219 ___ Sumber : Hasil data diolah tahun 2022 Nilai sig variabel X1 sebesar 0,634; Nilai sig variabel X2 sebesar 0,073 dan X3 0,219 lebih dari 0.05 artinya data variabel independen pada penelitian ini terhindar dari gejala heteroskedastisitas dan layak digunakan untuk menguji penelitian dengan model uji regresi linier berganda. Hasil Pengujian Hipotesis 4.4.1

Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda Penelitian ini menggunakan lebih dari satu variabel sebagai indikatornya, yaitu Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Peran Masyarakat (X3) dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y). Pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS 23. Berikut hasil pengujian regresi berganda. Tabel 4.12 Hasil Uji Regresi Linier Berganda Model _Unstandardized Coefficients _Standardized Coefficients _t _Sig. __ _B _Std. Error_Beta ___ _1_(Constant) _11,024 _2,653 ___ _4,156 _0,000 ___ _Akuntabilitas _0,136 _0,060 _0,155 _2,251 _0,029 ___ _Transparasi _0,647 _0,051 _0,853 _12,633 _0,000 ___ _Peran Masyarakat _0,202 _0,064 _0,276 _3,145 _0,003 ___ a.

Dependent Variable: Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa __ Sumber : Hasil data diolah tahun 2022 Berdasarkan tabel 4.12 diatas merupakan hasil perhitungan regresi linear linear berganda dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil persamaan regresi sebagai berikut: $a = 11,024$, $\beta_1 = 0,136$, $\beta_2 = 0,647$, $\beta_3 = 0,202$ sehingga persamaan regresi yaitu: $Y = a + \beta x_1 + \beta x_2 + \beta x_3$ atau $Y = 11,024 + 0,136 X_1 + 0,647 X_2 + 0,202 X_3 + e$ Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut: Nilai koefisien regresi variabel pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa akan

mengalami peningkatan sebesar 11,024 untuk 1 satuan apabila semua variabel bersifat konstan. Nilai koefisien regresi akuntabilitas terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sebesar 0,136.

Nilai ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan akuntabilitas sebesar 1 satuan diprediksi akan menurunkan e pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sebesar 0,136. Nilai koefisien regresi transparansi terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sebesar 0,647. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan akuntabilitas sebesar 1 satuan diprediksi akan menaikkan e pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sebesar 0,647.

Nilai koefisien regresi peran masyarakat terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sebesar 0,202. Nilai ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan akuntabilitas sebesar 1 satuan diprediksi akan menaikkan e pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa sebesar 0,202. 4.4.2 Koefisien Determinasi (R²) Tabel 4.13 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.828a	.686	.673	1.116	1.829

Sumber : Hasil data diolah tahun 2022 Berdasarkan hasil tabel 4.13 menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,828 artinya tingkat hubungan antara Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Peran Masyarakat (X3) dan Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y) adalah positif kuat.

Koefisien determinan R² (R Square) sebesar 0,686 artinya Akuntabilitas (X1), Transparansi (X2), Peran Masyarakat (X3) sebesar 0,686 atau 69%. Sedangkan sisanya sebesar 31% dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini. 4.4.3 Hasil Uji Kelayakan Model (Uji f) Uji f atau uji kelayakan model diperlukan untuk mengetahui apakah model regresi layak atau tidak untuk digunakan. Layak (andal) disini maksudnya adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terkait. Berikut adalah hasil dari uji-F dengan SPSS: Tabel 4.14

Uji f Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	201,302	3	67,101	53,887	.000b
Residual	92,146	74	1,245		
Total	293,449	77			

Sumber : Olahan Data SPSS Ver 22 Dari uji F pada tabel 4.14, diperoleh fhitung sebesar 53,887 dengan tingkat signifikansi 0,000, sedangkan ftabel sebesar 2,722 dengan taraf signifikansi 0,05.

Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa model layak dan penelitian dapat diteruskan karena fhitung > Ftabel (53,887 > 2,722) dengan probabilitas signifikansi penelitian lebih besar dari 0,05 (0,000 < 0,05) . 4.4.4 Uji Hipotesis (Uji t) Uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil perhitungan statistik

dapat dilihat dalam tabel 4.15 dibawah ini: Tabel 4.15 Tabel Uji t Model _Unstandardized Coefficients _Standardized Coefficients _t _Sig. _ _B _Std.

Error_Beta _ _ _ _1_(Constant) _11,024 _2,653 _ _4,156 _0,000 _ _Akuntabilitas _0,136
_0,060 _0,155 _2,251 _0,029 _ _Transparasi _0,647 _0,051 _0,853 _12,633 _0,000 _ _
_Peran Masyarakat _0,202 _0,064 _0,276 _3,145 _0,003 _ _a. Dependent Variable:

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa _ _Sumber : Hasil data diolah tahun 2022 Akuntabilitas (X1) **terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa** (Y) Tabel 4.15 menunjukkan bahwa hasil untuk variabel Akuntabilitas (X1) mempunyai nilai signifikansi lebih dari satu tingkat signifikansi ($0,029 < 0,05$).

Hal ini dapat di interpretasikan bahwa Akuntabilitas (X1) secara signifikan mempengaruhi **Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**. Maka jawaban hipotesis 1 yang menyatakan bahwa Akuntabilitas (X1) berpengaruh signifikan **terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa** (Y) dapat diterima. Transparasi (X2) **terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa** (Y) Tabel 4.15 menunjukkan bahwa hasil untuk variabel Transparasi (X2) mempunyai nilai signifikansi lebih dari satu tingkat signifikansi ($0,00 < 0,05$).

Hal ini dapat di interpretasikan bahwa Transparasi (X2) secara signifikan mempengaruhi **Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**. Maka jawaban hipotesis 2 yang menyatakan bahwa Transparasi (X2) berpengaruh signifikan **terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa** (Y) dapat diterima. Peran Masyarakat (X3) **terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa** (Y) Tabel 4.15 menunjukkan bahwa hasil untuk variabel Peran Masyarakat (X3) mempunyai nilai signifikansi lebih dari satu tingkat signifikansi ($0,003 < 0,05$).

Hal ini dapat di interpretasikan bahwa Peran Masyarakat (X3) secara signifikan mempengaruhi **Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa**. Maka jawaban hipotesis 3 yang menyatakan bahwa Peran Masyarakat (X3) berpengaruh signifikan **terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa** (Y) dapat diterima. Pembahasan Lewat penelitian ini penulis telah berhasil membuktikan secara empiris tentang pengaruh Akuntabilitas, Transparasi, dan Peran Masyarakat **Terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa** pada Kecamatan Tanjung Raja.

Hasil **pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat** dijelaskan sebagai berikut : 4.5.1 Akuntabilitas (X1) **terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa** (Y) Hasil penelitian ini menunjukan bahwa akuntabilitas berpengaruh signifikan **terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa**. Akuntabilitas (accountability) adalah kewajiban untuk memberikan **pertanggung jawaban** atau menjawab, dan

menerangkan kinerja serta tindakan seseorang badan hukum pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggung jawaban.

Konsep akuntabilitas di Indonesia memang bukan merupakan hal yang baru, hampir seluruh instansi dan lembaga pemerintah terus menekankan konsep akuntabilitas ini khususnya dalam menjalankan fungsi administratif pemerintahan. Transparansi (X2) terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa transparansi berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Transparansi menjadi sangat penting bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dalam menjalankan mandat dari rakyat.

mengingat pemerintah saat memiliki kewenangan mengambil berbagai keputusan penting yang berdampak bagi orang banyak, pemerintah harus menyediakan informasi yang lengkap mengenai apa yang dikerjakannya. Menurut Krina (2003) Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk mendapatkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yaitu informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Peran Masyarakat (X3) terhadap Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Y) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran masyarakat berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa.

Peran masyarakat dalam proses pelaksanaan anggaran desa ialah melakukan pengawasan pelaksanaan anggaran desa. Keterlibatan masyarakat dalam proses penganggaran adalah hal yang sangat penting baik bagi pemerintah desa maupun masyarakat. karena terlibatan mereka akan berkontribusi terhadap kualitas perencanaan program desa dan memberikan kesempatan bagi mereka dalam menuarakan apa yang menjadi kebutuhan mereka. BAB V SIMPULAN DAN SARAN Simpulan Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh Akuntabilitas Transparansi dan peran masyarakat dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh organisasi perangkat desa kecamatan tanjung raja dan menggunakan sampel 19 desa yang ada di kecamatan tanjung raja. Berdasarkan analisis dan pengujian hipotesis SPSS versi 23 dan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data berupa kuesioner yang telah diisi oleh responden. merujuk pada hasil analisis, pengujian hipotesis, pembahasan serta penelitian maka dapat dikemukakan beberapa simpulan penelitian sebagai berikut: Akuntabilitas berpengaruh signifikan dalam memberikan pertanggung jawaban terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ada di Kecamatan Tanjung Raja. Transparansi berpengaruh signifikan dalam menyediakan informasi terhadap

pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ada di Kecamatan Tanjung Raja Peran masyarakat berpengaruh signifikan dalam pengawasan pelaksanaan terhadap pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ada di Kecamatan Tanjung Raja. Berdasarkan keterbatasan pada penelitian ini, maka saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya antara lain: Penelitian selanjutnya, disarankan untuk menambah sampel penelitian, sehingga hasil penelitian yang diperoleh dapat menggambarkan keadaan yang nyata. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel independen atau variabel X yang dapat mempengaruhi pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa. Penelitian selanjutnya disarankan membedakan objek penelitian, sehingga dapat meneliti ditempat lain dengan pengaruh dan tujuan yang sama.

INTERNET SOURCES:

- <1% - eprints.umpo.ac.id > 827 > 2
- <1% - www.academia.edu > 39724103 > JAWABAN_UU_NO_6_TAHUN
- <1% - www.kelasmega.my.id > 2020 > 07
- <1% - repository.umsu.ac.id > bitstream > 123456789/5106/1
- <1% - www.jogloabang.com > pustaka > uu-6-2014-desa
- <1% - ejurnal.untag-smd.ac.id > index > PD
- <1% - repository.ummat.ac.id > 1139 > 1
- <1% - malangvoice.com > takdir-keadilan-hukum-untuk
- <1% - peraturan.bpk.go.id > Home > Details
- 3% - repository.stiewidyagamalumajang.ac.id > 700 > 3
- <1% - repository.radenintan.ac.id > 3317 > 1
- <1% - www.academia.edu > Manajemen_Sumber_Daya_Manusia
- <1% - adoc.pub > bab-ii-tinjauan-pustaka-yang-diharapkan
- <1% - repository.umsu.ac.id > bitstream > 123456789/5392/1
- <1% - www.berdesa.com > alur-dan-peran-dalam-penyusunan
- <1% - jimfeb.ub.ac.id > index > jimfeb
- <1% - www.bpkp.go.id > public > upload
- 1% - desabatukotam.id > baca-berita-166-peran
- <1% - blogoblokgoblok.blogspot.com > 2017 > 04
- <1% - repository.unja.ac.id > 23236 > 2
- <1% - etheses.uin-malang.ac.id > 704/6/08510076 Bab 2
- <1% - ibn.e-journal.id > index > JIBPU
- <1% - text-id.123dok.com > document > yr25k78z
- <1% - www.researchgate.net > journal > Assets-Jurnal
- <1% - repository.usd.ac.id > 31552/2/142114032_full
- <1% - digilib.uinsgd.ac.id > 4101/6/6_bab3

<1% - repository.uksw.edu › bitstream › 123456789/23045/2
<1% - lib.unnes.ac.id › 30124/1/8111413029
<1% - eprints.umpo.ac.id › 3782 › 1
<1% - eprints.umk.ac.id › 4799 › 3
<1% - www.berdesa.com › mengenal-anggaran-pendapatan-dan
<1% - eprints.ums.ac.id › 44839 › 3
1% - core.ac.uk › download › pdf
<1% - eprints.ums.ac.id › 47484 › 6
<1% - digilib.iain-palangkaraya.ac.id › 449 › 6
<1% - eprints.dinus.ac.id › 22704 › 12
<1% - repository.unair.ac.id › 30598 › 5
<1% - repository.poltekkes-tjk.ac.id › 289 › 6
<1% - ayuadika.wordpress.com › 2017/01/04 › agency-theory
<1% - abstrak.uns.ac.id › wisuda › upload
<1% - www.academia.edu › 36572289
<1% - eprints.undip.ac.id › 333 › 1
<1% - text-id.123dok.com › document › oy87v2jrz-hubungan
<1% - sutaryofe.staff.uns.ac.id › 2012/07/30 › hubungan
<1% - www.akuntansi.in › akuntansikeuangandaerah
<1% - etheses.uin-malang.ac.id › 2003/6/09520043_Bab_2
<1% - akuntanmaniak.blogspot.com › 2010 › 09
<1% - yunatun09.blogspot.com › 2011 › 06
<1% - manajemen-s1.com › 2019 › 07
<1% - www.mekarlaksana-ciparay.desa.id › artikel › 2021
<1% - repository.unpas.ac.id › 5668 › 7
<1% - repository.unib.ac.id › 593/1/1-NILA APRILA 1
1% - elibrary.unikom.ac.id › id › eprint
1% - repository.stei.ac.id › 82 › 2
1% - repository.unpas.ac.id › 28204 › 5
<1% - www.bpkp.go.id › public › sakd
<1% - www.online-pajak.com › seputar-pph-final
<1% - repository.uinsu.ac.id › 5450 › 1
<1% - e-journal.unipma.ac.id › index › assets
<1% - journal.umy.ac.id › index › jati
<1% - digilib.uinsby.ac.id › 31099 › 3
<1% - repository.um-palembang.ac.id › id › eprint
<1% - eprints.ummi.ac.id › 148/1/6 Pengaruh Transparansi dan
<1% - wartapenilai.id › 2020/09/30 › membangun
<1% - eprints.ums.ac.id › 51796 › 11
<1% - eprints.umm.ac.id › 64813 › 3

<1% - www.seputarpengetahuan.co.id > 2017/09/16
<1% - jp.feb.unsoed.ac.id > index > jeba
<1% - pendampingdesa.com > musyawarah-desa-dan-musyawah
<1% - zainulhadi.wordpress.com > 2011/01/19 > musyawarah
<1% - andalalin.files.wordpress.com > 2014 > 07
1% - alpha-i.or.id > kabar-alpha-i > peran-masyarakat
<1% - kuliahprodimanajemen.wordpress.com > 2018/01/02
<1% - digilib.uinsgd.ac.id > 3617/6/6_bab3
<1% - repository.uin-malang.ac.id > 1123 > 1
<1% - text-id.123dok.com > document > 9ynx5nlqv-teknik
<1% - pataayub.blogspot.com > 2018 > 12
<1% - repository.unpas.ac.id > 30421 > 6
<1% - www.slideshare.net > fianpalu > populasi-72820186
<1% - etheses.uin-malang.ac.id > 1841/13/09410169_Bab_3
1% - binangun-singgahan.desa.id > first > artikel
<1% - www.bpdmulyasari.com
<1% - repository.unmuhjember.ac.id > 253 > 1
<1% - kumparan.com > manik-sukoco > diskresi-dana-off
<1% - repository.untag-sby.ac.id > 1260 > 3
<1% - updesa.com > apbdes
<1% - desadidampingi.blogspot.com > 2016/07/4-bidang
<1% - eprints.undip.ac.id > 24290 > 1
<1% - beritatransparansi.co.id > transparansi-menurut
<1% - independent.academia.edu > DiyanithaKusumawardani
<1% - www.coursehero.com > file > 119613746
<1% - katadata.co.id > safrezi > berita
<1% - www.weschool.id > akuntabilitas-jenis-aspek
<1% - eprints.umm.ac.id > 41480 > 4
<1% - repository.unpas.ac.id > 41177 > 4
<1% - idpelajaranall.blogspot.com > 2021 > 11
<1% - www.slideshare.net > abdulmajid507 > jbptunpaspp-gdl
<1% - repository.unpas.ac.id > 46078 > 5
<1% - eurekapedidikan.com > pengertian-uji-validitas
<1% - repository.unsri.ac.id > 8127 > 3
<1% - eprints.umm.ac.id > 52968 > 5
<1% - haikawanku.wordpress.com > 2017/05/04 > penyajian
<1% - docs.google.com > document > d
<1% - repository.stei.ac.id > 297 > 3
<1% - pengertiandanartikel.blogspot.com > 2016 > 10
<1% - musyarofa.wordpress.com > 2018/12/09 > metode

<1% - qmc.binus.ac.id > 2014/11/01 > u-j-i-v-a-l-i-d-i-t-a
<1% - repository.dinamika.ac.id > id > eprint
<1% - manajemendankomputer.blogspot.com > 2017 > 01
<1% - tools.zoomtanzania.com > ms2_rumus-uji-validitas-instrumen
<1% - digilib.uinsby.ac.id > 8056 > 7
<1% - penerbitdeepublish.com > responden-penelitian
<1% - idr.uin-antasari.ac.id > 8380 > 8
<1% - eprints.ums.ac.id > 41416 > 25
<1% - eprints.umm.ac.id > 44761 > 5
<1% - digilib.uinsgd.ac.id > 3640/6/6_bab3
<1% - eprints.umm.ac.id > 41262 > 5
<1% - www.coursehero.com > file > p2uhsg5r
<1% - text-id.123dok.com > document > dzxm8vy-pengujian
<1% - journal.unrika.ac.id > index > beningjournal
<1% - labict.budiluhur.ac.id > uji-validitas-dan-realibi
<1% - eprints.undip.ac.id > 75327 > 4
<1% - eprints.undip.ac.id > 69803 > 5
<1% - www.academia.edu > 23252214 > PENGARUH_LINGKUNGAN
<1% - repository.pkr.ac.id > 1723/16/15
<1% - eteses.uin-malang.ac.id > 1586/8/11520093_Bab_4
<1% - www.rumusstatistik.com > 2020 > 10
<1% - dadukembar.blogspot.com > 2015 > 02
<1% - eteses.uin-malang.ac.id > 2422/11/09510018_Lampiran
<1% - tambahpinter.com > uji-normalitas
<1% - 123dok.com > article > penentuan-metode-estimasi
<1% - eprints.undip.ac.id > 55946 > 4
<1% - repository.unib.ac.id > 8155 > 2
<1% - eteses.uin-malang.ac.id > 2378/8/07510072_Bab_4
<1% - eprints.ums.ac.id > 43410 > 42
<1% - eprints.ums.ac.id > 67387 > 11
<1% - fe.unisma.ac.id > MATERI AJAR DOSEN > EKOMETRIK
<1% - accounting.binus.ac.id > 2021/08/06 > memahami-uji
<1% - www.coursehero.com > file > p6plieg
<1% - 123dok.com > article > uji-asumsi-klasik-pengujian
<1% - eteses.uin-malang.ac.id > 835/7/11510096 Bab 3
<1% - digilib.uinsby.ac.id > 10499 > 7
<1% - www.researchgate.net > publication > 335442378
<1% - www.coursehero.com > file > p2hn73c
<1% - repository.unib.ac.id > 8088 > 1
<1% - eprints.undip.ac.id > 23344 > 1

<1% - 123dok.com › article › kelayakan-model-contoh
<1% - www.coursehero.com › file › 108571247
<1% - digilib.uinsby.ac.id › 13110 › 7
<1% - eprints.umm.ac.id › 51180 › 4
<1% - ecampus.iainbatusangkar.ac.id › batusangkar
<1% - akurasi.unram.ac.id › index › akurasi
<1% - jurnal.uns.ac.id › habitus › article
<1% - repository.uinbanten.ac.id › 3727 › 6
<1% - keuangannegara.id › dasar-pengetahuan › akuntabilitas
<1% - www.coursehero.com › file › p5f2i57
<1% - jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id › index › jira
<1% - digilib.uinsgd.ac.id › 32518
<1% - smartstatistik-indonesia.co.id › cara-membuat-data